KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUNGA RAMPAI REKOMENDASI KEBIJAKAN

FORUM EKONOM KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018

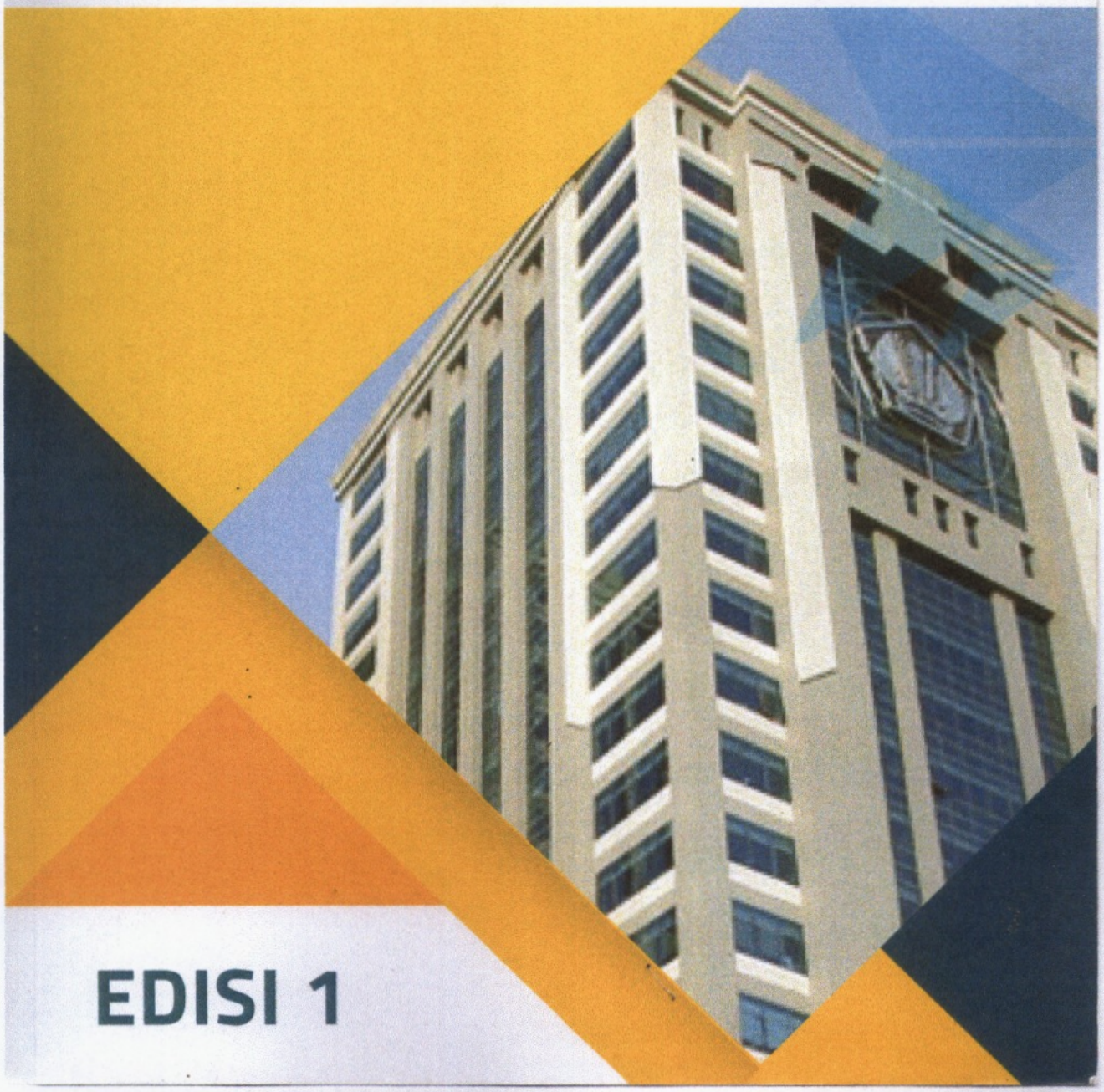

EDISI 1

BUNGA RAMPAI
REKOMENDASI KEBIJAKAN

FORUM EKONOM KEMENTERIAN KEUANGAN 2018

JILID I

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
2018

BUNGA RAMPAI REKOMENDASI KEBIJAKAN

FORUM EKONOM KEMENTERIAN KEUANGAN 2018

© 2019, Kementerian Keuangan

Pembina:
Suahasil Nazara

Pengarah:
Adriyanto, Ph.D.

Tim Penyusun:
Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) Tahun 2018

Laporan dan Dokumentasi :
Tim PKEM, BKF, Tim Biro KLI, Sekretariat Jenderal

Editor:
Riznaldi Akbar, Ph.D.

Sekretariat :
Tim Pusat Kebijakan Ekonomi Makro-BKF, Tim Organisasi dan Tata Laksana-Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tim Biro Komunikasi dan Layanan Informasi-Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Desain Grafis:
Tim Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Penerbit:
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-53083-4-5

DAFTAR FORUM EKONOM
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018

NAMA	UNIVERSITAS
Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec	Universitas Sumatera Utara
Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc	Universitas Andalas
Prof. Dr. Bernadette Robiani, S.E., M.Sc	Universitas Sriwijaya
Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D	Universitas Padjadjaran
Akhmad Syakir Kurnia, Ph.D	Universitas Diponegoro
Dr. Rudi Purwono	Universitas Airlangga
Poppy Ismalina, M.Ec.Dev., Ph.D	Universitas Gajah Mada
Prof. Dr. Mansur Afifi	Universitas Mataram
Prof. Dr. Eddy Suratman	Universitas Tanjungpura
Prof. Muhammad Handry Imansyah, MAM., Ph.D	Universitas Lambung Mangkurat
Mohamad Ahlis Djirimu, S.E., DEA., Ph.D	Universitas Tadulako
Dr. Noldy Tuerah, S.E., MA	Universitas Sam Ratulangi
Prof. Marsuki, DEA	Universitas Hasanuddin
Dr. Rully N Wurarah	Universitas Papua
Dr. Teddy Christianto Leasiwal, S.E., M.Si	Universitas Pattimura

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	**vii**
KATA SAMBUTAN	**xi**
PRAKATA FORUM EKONOM	**xiii**
KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENDORONG STABILITASI NERACA BERJALAN	**1**
Pendahuluan	1
Rekomendasi Kebijakan Fiskal Dalam Mendorong Stabilitas Neraca Berjalan	5
KEBIJAKAN FISKAL YANG MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM DAERAH	**9**
Pendahuluan	9
Kebijakan Fiskal dan UMKM Daerah	10
Rekomendasi Kebijakan	12
Referensi	14
KEBIJAKAN FISKAL YANG MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM DAERAH	**15**
Peran Pajak UMKM dalam Mendorong UMKM "Naik Kelas"	15
Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Mendorong UMKM Tumbuh Melalui Akses Permodalan	18
Rekomendasi Kebijakan	19
KEBIJAKAN FISKAL YANG MENDORONG STABILISASI NERACA BERJALAN	**21**

Latar Belakang 21
Perkembangan Neraca Berjalan Indonesia 22
Daftar Bacaan 29

KEBIJAKAN FISKAL YANG MENDORONG STABILISASI NERACA BERJALAN 31

Pendahuluan 31
Permasalahan 32
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 38
Referensi 39

KEBIJAKAN FISKAL DAN NON-FISKAL MENDORONG EKSPOR 41

Pengantar 41
Data Ekspor dan Impor Indonesia 41
Gerak Ekspor dan Impor 42
Dinamika Pergerakan Neraca Perdagangan dan Jasa 43
Penutup dan Rekomendasi 44
Tabel Beberapa Kebijakan Mendorong Ekspor 45
Lampiran: 49

KEBIJAKAN FISKAL YANG MENDORONG STABILISASI NERACA BERJALAN 51

Pendahuluan 51
Volatilitas Kurs Merupakan Akar Masalah Ketidakstabilan Neraca Berjalan 52
Berbagai Pilihan Strategi Bagi Indonesia 59
Peran Instrumen Fiskal Dalam Stabilitas Neraca Berjalan 60
Kesimpulan 61

MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM MELALUI KEBIJAKAN FISKAL BERDASATKAN SEKTOR USAHA 65

ANALISIS PERKEMBANGAN UMKM DI INDONESIA 69

I. Pengantar 69
II. Perkembangan UMKM di Indonesia 71
III. Potensi dan Tantangan bagi UMKM Indonesia 80
IV. Peraturan Mengenai UMKM 83

V. Kredit Usaha Rakyat 85
VI. Rekomendasi Kebijakan untuk Pengembangan UMKM 90
Referensi 94

TANTANGAN OPTIMALISASI POTENSI UMK DI TENGAH DUALISME ORGANISASI PRODUKSI 97

UMK dan Dualisme Globalisasi 99
UMK dan Dualisme Teknologi 100
Dualisme Pembiayaan dan Perlunya Keberpihakan 100
Referensi 102

TANTANGAN OPTIMALISASI POTENSI UMK DI TENGAH DUALISME ORGANISASI PRODUKSI

Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D

Ekonom sekaligus akademisi FEB Universitas Diponegoro Semarang; lahir di Pekalongan 10 Juni 1973; menamatkan S-1 dan S-2 pada program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada (UGM). Gelar Doktor pada Economics and Finance diperoleh dari School of Business, Curtin University Australia. Saat ini, ia bertanggung jawab sebagai Kepala Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB UNDIP setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Pembangunan, LPPM UNDIP dan Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LSKE) FEB UNDIP. Selain kesibukannya di Kampus, saat ini ia juga aktif sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BPD Jateng; Komite Perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Regional Economist Kementerian Keuangan RI.

Dualisme ekonomi yang pertama kali diperkenalkan oleh J. H. Boeke pada tahun 1953 yang menggambarkan bekerjanya dua organisasi produksi secara bersamaan dalam suatu perekonomian nampak relevan untuk menggambarkan nasib usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia vis a vis Usaha Menengah Besar (UMB). Di satu sisi peran penting UMK bagi perekonomian Indonesia sangat meyakinkan dengan share 98,33 persen dari total 26,7 juta usaha. Dengan jumlah sebesar 26,3 juta usaha, UMK berhasil menyerap sebanyak 53,6 juta tenaga kerja dari total 70,3 juta orang, atau 76,28 persen dari total tenaga kerja di luar sektor pertanian (Biro Pusat Statistik, 2017). Belum lagi jika kita memasukkan

sektor pertanian yang pada Agustus 2017 tercatat menyerap 29,68 persen dari total *employment*. Namun pada saat yang sama, kontribusi UMK terhadap PDB tercatat sebesar 43,08 persen, terdiri dari usaha mikro sebesar 30,25 persen dan 12, 83 persen sisanya dari usaha kecil. Pada saat yang sama, dengan jumlah hanya 1,67 persen dari total jumlah usaha, UMB memberikan kontribusi 56,92 persen. Gap antara peran UMK dalam menyerap tenaga kerja dan kontribusinya terhadap PDB menunjukkan distribusi pendapatan yang timpang antara UMK dengan Usaha menengah besar (UMB) sekaligus memberikan gambaran wajah dualisme ekonomi Indonesia.

Terminoiogi dualisme ekonomi pertama kali digunakan oleh Boeke untuk menggambarkan produksi dan organisasi yang asimetris di Indonesia sekaligus menunjuk suatu perekomian yang terbelah antara sektor tradisional dan sektor modern yang dijalankan oleh kolonialisme Belanda (Higgins, 1956). Dengan demikian, dualisme ekonomi terjadi sebagai hasil dari desain struktur ekonomi yang di satu sisi memberikan ruang bagi sebagian organisasi ekonomi untuk bekerja di bawah rejim yang paternalistik dan quasi-feodal. Sementara di sisi lain sebagian besar organisasi produksi dibiarkan bekerja secara marginal dalam sistem persaingan pasar. Dalam sistem yang melahirkan dualisme ekonomi ini, membiarkan kedua sistem produksi dan organisasi untuk bersaing dalam sistem ekonomi pasar bebas adalah tidak fair. Tulisan ini memberikan gambaran posisi UMK berhadapan dan bersaing vis a vis UMB dalam pasar persaingan bebas dan intervensi yang semestinya dilakukan dalam rangka meningkatkan peran UMK mengingat posisi strategis UMK berkaitan dengan isu-isu pembangunan, pengangguran dan kemiskinan misalnya. Tulisan ini mengungkap posisi strategis UMK sekaligus persoalan yang dihadapi UMK di Indonesia hingga saat ini yang digambarkan dengan pendekatan teori dualisme mencakup dualisme globalisasi, teknologi, dan dualisme pembiayaan. Akhir dari tulisan ini memberikan penekanan pada aspek kelembagaan yang dipandang sebagai akar persoalan sekaligus kerangka bagi upaya meningkatkan peran UMK di Indonesia yang sejauh ini menjadi garda sekaligus bemper bagi ekonomi Indonesia.

UMK dan Dualisme Globalisasi

Globalisasi mempunyai watak ganda bagi UMK. Globalisasi menciptakan keterbukaan pasar bagi produk-produk luar negeri sehingga berdampak negatif bagi UMK yang tidak mempunyai daya saing. Globalisasi juga membuka akses pasar luar negeri bagi produk UMK sehingga memberikan dampak positif bagi UMK yang memiliki daya saing. Dengan demikian, dampak globalisasi bagi UMK bergantung pada sejauh mana UMK di Indonesia memiliki daya saing dan siap dengan keterbukaan pasar. Sejauh mana UMK Indonesia mampu mengoptimalkan dampak positif dapat dilihat dari kontribusi UMK terhadap ekspor sekaligus sejauh mana terlibat dalam jarinhgan bisnis global. Berdasarkan sensus ekonomi 2016 usaha mikro hanya manyumbang 1,23 persen terhadap total ekspor Indonesia, sedangkan usaha kecil sebesar 2,47 persen. Keterlibatan UMK Indonesia dalam jaringan produksi global juga masih sangat rendah dibandingkan UMK negara ASEAN yakni 6,3 persen termasuk usaha menengah (Wignaraja, G. and Jinjarak, 2015). Rendahnya kontribusi UMK dalam aktivits ekspor dan jaringan distribusi global menggambarkan tertinggalnya UMK dalam arus lalu lintas produk antar negara sekaligus menunjukkan adanya dualisme globalisasi yang dihadapi UMK. Besarnya jumlah usaha mikro dan kecil di Indonesia diakui sebagai kekuatan di satu sisi, namun di sisi yang lain daya saing UMK Indonesia masih rendah dalam memanfaatkan dampak keterbukaan ekonomi.

Masih rendahnya daya saing UMK tidak terlepas dari karakteristik UMK yang sekaligus menjadi faktor penyebab, yakni rendahnya kualitas SDM, skala ekonomi yang tidak efisien, serta budaya perusahaan yang tidak mendukung. Pada saat yang sama, pendekatan intervensi pemerintah terhdap UMK lebih bersifat kesejahteraan sosial. Dengan kondisi yang ada tersebut, mengharapkan UMK untuk berdaya saing tanpa intervensi pemerintah dengan pendekatan bisnis yang embodied di dalam strategi industrialisasi rasanya akan sulit. Orientasi ekspor dalam strategi industralisasi Indonesia yang selama ini bias pada UMB perlu digeser ke arah strategi Industrialisasi yang berbasis luas melibatkan UMK sebagaimana dilakukan oleh Thailand dan Malaysia. Melalui SME

plan, Thailand mengembangkan UMK sebagai bagaian peting dalam mata rantai produksi industry otomotif sebagai pemasok *intermediary inputs*, sedangkan Malaysia mengembangkan UMK sebagai bagian dari pemasok *intermediary inputs* di industri elektronika.

UMK dan Dualisme Teknologi

Fleksibilitas UMK dalam merespon dinamika lingkungan bisnis menjadi kendala yang juga harus diatasi. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi dengan digital ekonomi sebagai *backbone* kegiatan ekonomi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, namun kekakuan usaha yang merupakan karakteristik dasar yang melekat pada UMK menjadikan UMK tertinggal dalam merespon perubahan. Berdasarka survey yang dilakukan oleh Bank Dunia, hanya 17,1 persen perusahaan kecil di Indonesia yang telah menggunakan teknologi yang berlisensi. ("World Bank Enterprise Survey," 2015). Ini menunjukkan sangat sedikit jumlah UMK yang mempunyai kemampuan teknis dan operasional untuk mencapai standar global perusahaan multinasional.

Pemanfaatan internet sangat penting untuk dilakukan oleh UMK untuk bisa masuk ke dalam jaringan bisnis global. Ditilik dari aspek ini, kebanyakan UMK Indonesia masih belum memanfaatkan teknologi internet untuk informasi produk dan pemasaran. Sensus ekonomi 2016 mencatat hanya 602.658 UMK atau baru 2,29 persen dari total UMK yang ada di Indonesia yang telah memanfaatkan interent. Hal tersebut sangatlah minim di tengah fakta bahwa 51% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet (Sari, Y.M, 2015). Isu mengenai *digital disruption* dan potensi dampaknya terhadap mata rantai nilai dari produk UMK harus menjadi perhatian untuk diantisipasi oleh pemerintah melalui strategi peningkatan *Global Value Chain* dimana intensitas kandungan teknologi informasi sangat menetukan.

Dualisme Pembiayaan dan Perlunya Keberpihakan

Permasalahan klasik yang dihadapi UMK yang masih berlanjut hingga saat ini adalah keterbatasan akses pembiayaan untuk permodalan. Keterbatasan akses sumber daya produktif ini berkelindan dan saling melengkapi dengan permasalahan pengelolaan usaha dan sumber daya

manusia yang *undercapacity*, ditambah kelembagaan UMK yang sebagian besar berupa usaha informal *(shadow economoy)*. Sementara regulasi terkait pembiayaan dari lembaga keuangan menuntut kecukupan kapasitas, sehingga hal ini menyebabkan UMK terlempar dari pasar keuangan secara sistemik. Dengan kata lain, desain sistem untuk pasar keuangan yang berbasis risiko secara otomatis menciptakan *barrier* bagi UMK dalam mengakses modal. Dalam hal ini, peran strategis UMK dalam perekonomian yang merupakan keniscayaan harus berhadapan dengan kendala berupa barrier yang sifatnya kelembagaan di pasar keuangan baik dari sisi *demand* maupun *supply*. Hal ini selanjutnya mendorong terjadinya bias pembiayaan kepada UMB yang karakteristik risikonya lebih *manageable* dibandingkan UMK.

Dengan organisasi produksi yang tidak simetris antara UMK dan UMB, intervensi pemerintah untuk membuka akses permodalan memegang peran kunci. Membiarkan UMK dalam persaingan bebas justru akan memperlebar gap dan melanggengkan dualisme antara UMK dan UMB. Komitmen untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMK yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, harus diwujudkan dengan komitmen keberpihakan yang kongkrit terhadap UMK. Kesulitan UMK dalam mengakses pembiayaan dari Lembaga keuangan harus diatasi dengan memahami karakteristik khas UMK yang sebagian besar adalah usaha informal dan tidak memliki agunan yang qua-regulasi menjadi faktor kendala. Oleh karena itu, komitmen untuk mendorong UMK harus diikuti dengan penyesuaian terhadap regulasi yang dinilai menghambat atau diskresi regulasi khusus untuk UMK. Undang-Undang UMK nomor 20 tahun 2008 saat ini dinilai masih belum cukup untuk mendorong UMK. Diperlukan regulasi yang khusus untuk perlindungan dan pemberdayaan UMK sebagaimana regulasi yang sudah ada ada saat ini untuk perlindungan dan pemberdayaan petani (UU No. 19/2013) dan nelayan (UU. No.7/2016).

Program-program yang saat ini telah digulirkan untuk mendorong UMK seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema subsidi suku bunga dan Kredit Ultra Mikro (UMi) yang tahun 2018 ini akan diluncurkan perlu dukungan kelembagaan yang kuat. Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi *backbone* penyaluran KUR perlu ditingkatkan untuk

memastikan tidakterjadinya *inclusion error*. Begitu juga dengan program-program UMK oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan sinergintasnya dengan dukungan perencanaan yang kuat dan terarah. Regulasi oleh otoritas lembaga keuangan yang mewajibkan batasan minimal penyaluran kredit kepada UMK oleh perbankan perlu ditetapkan menjadi indikator kunci kinerja bank selain kinerja keuangan dan profil risikotentunya.

Referensi

Biro Pusat Statistik. (2017). *Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing : Analisis*

ketenagakerjaan usaha mikro kecil.

Higgins, B. (1956). The Dualistic Theory of Underdeveloped Areas. *Economic Development and Cultural Change, 4*(2).

Sari, Y. M, et. al. (2015). *Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi MEA 2015 dan Pasca MEA 2025* (No. WP/9/2015).

Wignaraja, G. and Jinjarak, Y. (2015). Why do SMEs not Borrow More from Banks?

Evidence from People's Republic China and Souteast Asia. *ADBI Working Paper, 509.*

World Bank Enterprise Survey. (2015). Retrieved from http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2015/indonesia#innovation-and-technology--size